

**IMPLEMENTASI SISTEM POINT  
DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA MADRASAH  
ALIYAH NEGERI 2 MODEL BANJARMASIN  
(Tinjauan dalam perspektif Bimbingan dan Konseling )**

Haderani

Jurusan Kependidikan Islam Prodi Bimbingan Konseling Islam  
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin  
Email: drshaderani@yahoo.com

**ABSTRACT**

Problems facing the school is juvenile delinquency. Juvenile delinquency is so alarming cause of school MAN 2 Model Banjarmasin implement the system implementation point towards the students. With the hope that students be disciplined and strive to obey school rules at school are also at home. Peneitian This is a case study at MAN 2 Banjarmasin Model. Implementation of the system implementation point at MAN 2 Banjarmasin Model makes the students discipline, abide by the rules and deliver successful students when he graduated from school.

**Keywords:** *implementation, point system, juvenile delinquency*

**ABSTRAK**

Masalah yang dihadapi sekolah adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja yang begitu mengkhawatirkan menyebabkan sekolah MAN 2 Model Banjarmasin menerapkan implementasi sistem point pada siswanya. Dengan harapan siswa menjadi disiplin dan berusaha menaati peraturan sekolah baik di sekolah juga di rumah. Peneitian ini adalah penelitian studi kasus pada MAN 2 Model Banjarmasin. Penyelenggaraan implementasi sistem point pada MAN 2 Model Banjarmasin mampu membuat siswa disiplin, taat pada peraturan dan mengantarkan siswa sukses ketika lulus dari sekolah.

**Kata Kunci:** *implementasi, sistem point, kenakalan remaja*

**PENDAHULUAN**

Pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengarahkan perkembangan manusia agar menuju ke arah yang baik, yaitu perkembangan kepribadian manusia. Sebagaimana telah dirumuskan bahwa pendidikan adalah upaya mengarahkan perkembangan kepribadian (aspek *psikologik* dan *psikofisik*) manusia sesuai dengan hakikatnya agar menjadi insan kamil, dalam rangka mencapai tujuan akhir kehidupannya, yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. (Aunur Rahim Faqih, 2004,)

Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada kapasitas satuan-satuan

pendidikan dalam mentranformasikan nilai-nilai budaya kepada peserta didik untuk memperoleh nilai tambah, baik yang terkait dengan aspek olah pikir, rasa, hati dan raganya. Dari sekian banyak komponen pendidikan, guru merupakan faktor yang sangat penting dan strategis dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan, berapapun besarnya investasi yang ditanamkan untuk memperbaiki mutu pendidikan, tanpa kehadiran guru yang kompeten, profesional, bermartabat, dan sejahtera dapat dipastikan tidak akan tercapai tujuan yang diharapkan.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan merupakan salah satu wadah

pelaksanaan proses pendidikan dan sarana pengembangan sumber daya manusia dalam menghasilkan insan-insan pembangunan yang terampil dan berkualitas. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran kepala madrasah, guru, dan karyawan yang ada di madrasah dalam rangka mencapai mutu pendidikan yang berkualitas tinggi dalam berbagai bidang baik agama maupun keterampilan umum lainnya sehingga diminati oleh masyarakat.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 bab II pasal 3 dinyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam rangka mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dituntut lembaga pendidikan yang bermutu dan memiliki disiplin karena disiplin itu merupakan kunci sukses hari depan. Untuk itu semua pendidikan tidak dapat dilaksanakan secara otoriter, yang mencoba memaksa peserta didik agar berperilaku disiplin, patuh dan taat terhadap kehendak dan ketentuan sekolah, namun pendidikan sekolah hendaknya bersikap demokratis, yang dapat memahami kehendak dan tuntutan peserta didik dan kepentingan sekolah/madrasah secara berimbang, karena bila anak dibesar dengan penuh tekanan, maka anak akan belajar melawan.

Sehubungan dengan tujuan pendidikan sebagai mana terungkap di atas yakni untuk mengembang kan potensi kognitif, sikap dan keterampilan peserta didik maka pendidik/tenaga kependidikan memikul tanggung jawab untuk membimbing, mengajar dan melatih murid

atas dasar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, adat, hukum, ilmu dan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Untuk itu perlu ditanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, berani mawas diri, beriman dan lain-lain. Hukuman pun sering diterima siswa manakala mereka melanggar tata tertib yang telah disepakati. Hukuman itu dimaksudkan sebagai upaya mendisiplinkan siswa terhadap peraturan yang berlaku. Sebab, dengan sadar pendidik memegang prinsip bahwa disiplin itu merupakan kunci sukses hari depan.

Apakah bentuk-bentuk hukuman bisa dikembangkan untuk mendisiplinkan siswa? Pertanyaan seperti inilah menjadi dilema bagi kaum pendidik dalam mengemban kewajiban dan tanggung jawabnya. Dalam pembentukan, pembinaan dan pengembangan kedisiplinan, setiap sekolah sebagai lembaga pendidikan yang bersifat formal, negeri maupun swasta perlu mempunyai aturan atau tata tertib. Hal ini dikarenakan peranan tata tertib di sekolah adalah mengatur kehidupan para pelajar baik yang bersifat kurikuler maupun ekstra kurikuler. Dalam kenyataan sehari-hari masih banyak diantara para pelajar yang melanggar tata tertib sekolah, apalagi sanksi hukuman sama sekali tidak diadakan niscaya perilaku siswa akan lebih semrawut. Kita bisa menduga-duga, ada penerapan hukuman saja masih banyak siswa yang melanggar, apalagi jika sanksi hukuman ditiadakan.

Pendidikan erat kaitannya dengan belajar, pendidikan dapat diperoleh dengan belajar, baik secara formal ataupun tidak. Karena pada hakekatnya intisari dari belajar adalah perubahan. Belajar adalah kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. (Syaiful Bahri Djamarah, 2002, h. 13.)

Untuk itu perlu diciptakan situasi dan kondisi sekolah yang aman, damai dan

menyenangkan, agar peserta didik dapat mengembangkan segenap potensi dirinya seoptimal mungkin. Dengan demikian dapat dikatakan maju dan berkembangnya suatu masyarakat, bangsa dan negara tergantung pada kualitas pendidikan. Oleh karena itu setiap lembaga pendidikan dituntut untuk mengarahkan peserta didik memperoleh perubahan sikap dan perilaku yang baik dengan memberikan bimbingan secara persuasive terhadap setiap peserta didik, khususnya yang perilaku menyimpang, agar menjadi anak yang berakhlak mulia.

Guru seharusnya memiliki pandangan bahwa siswa yang berperilaku menyimpang adalah siswa yang tidak mampu berperilaku baik, oleh karena itu perlu mendapat bantuan dan pertolongan agar siswa mampu berperilaku baik bukan menekan dan memaksa mereka agar berperilaku sesuai kehendak guru/sekolah, apalagi menghindar dengan mengambalikan peserta didik yang bermasalah kepada orangtuanya.

Sehubungan dengan hal ini madrasah sebagai lembaga pendidikan perlu memberikan layanan individual terhadap siswa yang melakukan pelanggaran disiplin dan membinanya menjadi siswa disiplin, disamping itu pula perlu membuat strategi untuk mengurangi jumlah pelanggaran serta dapat mengukur jenis pelanggarannya. Dalam hal ini strategi sistem poin yang diterapkan pada MAN 2 Model diharapkan dapat mengurangi tingkat pelanggaran disiplin. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengungkap hal ini dalam perspektif bimbingan dan konseling dengan melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Implikasi Sistem Point Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin”

Untuk menghindari terjadinya berbagai macam penafsiran yang kurang tepat atas judul penelitian ini maka terlebih dahulu diberi batasan pengertian sebagai berikut:

#### 1. Implimentasi Sistem Point

Yang dimaksud Implimentasi Sistem Point dalam penelitian ini adalah pemberian skor/point terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan siswa MAN 2 Model dalam rangka penerapan tata tertib dan disiplin pada MAN 2 Model Banjarmasin.

#### 2. Penyelenggaraan Pendidikan

Aktivitas Pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan pada jam sekolah meliputi aktivitas pembinaan kepribadian, pembelajaran, keterampilan dan ekstra kurikuler pada MAN 2 Model Banjarmasin.

### KAJIAN TEORITIS

#### 1. Pendidikan, Hukuman dan Disiplin

Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada kapasitas satuan-satuan pendidikan dalam mentransformasi kan nilai-nilai kepada peserta didik untuk memperoleh nilai tambah, baik yang terkait dengan aspek olah pikir, rasa, hati dan raganya. Sekolah atau madrasah sebagai lembaga pendidikan merupakan salah satu pelaksanaan proses pendidikan dan sarana pengembangan sumber daya manusia dalam menghasilkan insan-insan pembangunan yang terampil dan berkualitas. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran kepala sekolah dan seluruh guru, staf karyawan yang ada di sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas, baik bidang agama maupun keterampilan umum lainnya sehingga diminati oleh masyarakat.

Dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 bab II pasal 3 dinyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu semua pendidikan tidak dilaksanakan secara otoriter, yang mencoba memaksa peserta didik agar berperilaku disiplin, patuh dan taat terhadap kehendak dan ketentuan madrasah, namun pendidikan madrasah hendaknya bersikap demokratis, yang dapat memahami kehendak dan tuntutan peserta didik dan kepentingan madrasah secara berimbang, karena bila anak dibesarkan dengan penuh tekanan, maka anak akan belajar melawan. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan siswa dalam belajar di sekolah adalah menegakkan disiplin dan ketertiban, yang dilandasi nilai-nilai budi pekerti luhur yang diintegrasikan pada mata pelajaran seperti pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, serta mata pelajaran lain yang relevan

Dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran tidak akan terlepas dari pada bagaimana cara untuk mencapai tujuan atau bagaimana cara mengajar agar bisa berjalan dengan lancar berdasarkan metode atau alat yang akan digunakan. Alat pendidikan ialah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Dalam menggunakan alat pendidikan ini, pribadi guru yang menggunakannya adalah sangat penting, sehingga penggunaan alat pendidikan itu bukan sekedar persoalan teknis belaka, akan tetapi menyangkut persoalan batin atau pribadi anak.

Hukuman sebagai salah satu teknik pengelolaan kelas sebenarnya masih terus menjadi bahan perdebatan. Akan tetapi, apa pun alasannya, hukuman sebenarnya tetap diperlukan dalam keadaan sangat terpaksa, katakanlah semacam pintu darurat yang suatu saat mungkin diperlukan.

Hukuman merupakan alat pendidikan represif, disebut juga alat pendidikan korektif, yaitu bertujuan untuk menyadarkan anak kembali kepada hal-hal

yang benar dan/atau yang tertib. Alat pendidikan represif diadakan bila terjadi suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan peraturan-peraturan atau suatu perbuatan yang dianggap melanggar peraturan. Maka yang dimaksud dengan hukuman di sini adalah hukuman langsung, dalam arti dapat dengan segera menghentikan tingkah laku siswa yang menyimpang. Hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa, dan dengan adanya nestapa itu anak akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulangnya. (Amin Danien Indrakusuma, 1973:14). Menghukum adalah memberikan atau mengadakan nestapa/penderitaan dengan sengaja kepada anak yang menjadi asuhan kita dengan maksud supaya penderitaan itu betul-betul dirasainya untuk menuju kearah perbaikan. (Suwarno, 1981:115).

Dalam teori belajar (*learning theory*) yang banyak dianut oleh para *behaviorist*, hukuman (*punishment*) adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang diharapkan. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Sebagai contoh, di sekolah-sekolah berkelahi adalah sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan dan jika tingkah laku ini dilakukan oleh seorang siswa maka salah satu cara untuk menghilangkan tingkah laku itu adalah dengan hukuman. Selain itu, mengerjakan tugas sekolah adalah sebuah tingkah laku yang diharapkan, dan jika seorang siswa lalai dan tidak mengerjakan tugas sekolah, maka hukuman adalah satu cara yang digunakan untuk mengatasinya agar siswa itu dapat menampilkan tingkah laku yang diharapkan.

Hukuman diartikan sebagai salah satu tehnik yang diberikan bagi mereka yang melanggar dan harus mengandung makna edukatif, Misalnya, yang terlambat masuk sekolah diberi tugas untuk membersihkan halaman sekolah, yang tidak masuk kuliah diberi sanksi membuat paper. Sedangkan hukuman pukulan merupakan hukuman terakhir bilamana hukuman yang lain sudah tidak dapat diterapkan lagi. Hukuman tersebut dapat diterapkan bila anak didik telah beranjak usia 10 tahun, tidak membahayakan saraf otak peserta didik, serta tidak menjadikan efek negatif yang berlebihan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw yang artinya “Dari Amr bin Syu’aib ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw pernah berkata suruhlah anak-anakmu melakukan shalat sejak usia tujuh tahun dan Pukullah jika tidak mau sholat di usia sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.” (HR. Dawud)

Paul Chanche mengartikan hukuman adalah “The procedure of decreasing the likelihood of a behavior by following it with some aversive consequence” (Prosedur penurunan kemungkinan tingkah laku yang diikuti dengan konsekuensi negatif) *Decreasing the likelihood* yang dimaksud di sini adalah penurunan kemungkinan dan tingkah laku dan *some aversive consequence* adalah konsekuensi negatif atau dampak yang tidak baik bagi si pelanggar. Sebagai contoh, Ani tidak boleh menonton TV ketika maghrib tiba (dari jam 18.00-19.00). Apabila tetap menonton maka Ani akan di hukum tidak boleh menonton TV selama 3 hari. Tidak boleh menonton TV ketika maghrib tiba di sini sebagai prosedur atau aturan-aturan yang harus diikuti. Bentuk penurunan tingkah lakunya adalah boleh menonton TV selain di waktu itu, dan sebagai konsekuensi negatif apabila melanggar akan dihukum tidak boleh menonton TV selama 3 hari.

Sedangkan M. Arifin telah memberi pengertian hukuman adalah: “Pemberi rasa

nestapa pada diri anak akibat dari kesalahan perbuatan atau tingkah laku anak menjadi sesuai dengan tata nilai yang diberlakukan dalam lingkungannya.” (M. Arifin, 1994 h. 175-176). Pendidik harus tahu keadaan anak didik sebelumnya dan sebab anak itu mendapat hukuman sebagai akibat dari pelanggaran atau kesalahannya. Baik terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan anak didik atau norma yang terdapat dalam ajaran agama Islam.

Dalam menggunakan hukuman, hendaknya pendidik melakukannya dengan hati-hati, diselidiki kesalahannya kemudian mempertimbangkan akibatnya. Penggunaan hukuman dalam pendidikan Islam kelihatannya mudah, asal menimbulkan penderitaan pada anak, tetapi sebenarnya tidak semudah itu tidak hanya sekedar menghukum dalam hal ini hendaknya pendidik bertindak bijaksana dan tegas dan oleh Muhammad Quthb dikatakan bahwa : “Tindakan tegas itu adalah hukuman”. (Muhammad Quthb, 1993), hal. 341). Jadi, hukuman di sini berlaku apabila seseorang merasa enggan untuk mengikuti suatu aturan yang berimbas pada penurunan tingkah laku.

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita ambil kesimpulan sementara bahwa hukuman dalam pendidikan Islam adalah salah satu cara atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pendidik kepada seseorang yang menimbulkan dampak yang tidak baik (penderitaan atau perasaan tidak enak) terhadap anak didiknya berupa denda atau sanksi yang ditimbulkan oleh tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar anak didik menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya untuk tidak mengulangnya lagi dan menjadikan anak itu baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Hukuman tidak mutlak diperlukan, untuk membuat anak jera, pendidik harus berlaku bijaksanan dalam memilih dan memakai metode yang paling sesuai. Di antara mereka ada yang cukup dengan

teladan dan nasehat saja, sehingga tidak perlu hukuman baginya. Tetapi, manusia itu tidak sama seluruhnya, diantara mereka ada pula yang perlu dihukum karena berbuat kesalahan. Asumsi yang berkembang selama ini di masyarakat adalah setiap kesalahan harus memperoleh hukuman; Tuhan juga menghukum setiap orang yang bersalah. Dari satu jalur logika *teori* itu ada benarnya. Memang logis, setiap orang yang bersalah harus mendapat hukuman; setiap yang berbuat baik harus mendapat ganjaran.

Tujuan sebenarnya dari pemberian hukuman adalah menginginkan adanya penyadaran agar anak tidak lagi melakukan kesalahan. M. Mgalim Purwanto mengklasifikasi tujuan hukuman berkaitan teori-teori hukuman, yaitu:

- a. Dalam Teori Pembalasan, hukuman diadakan sebagai pembalasan dendam terhadap pelanggaran yang telah dilakukan seseorang.
- b. Menurut teori perbaikan hukuman diadakan untuk memperbaiki si pelanggar agar jangan berbuat kesalahan semacam itu lagi.
- c. Menurut teori Pelindungan, hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar.
- d. Menurut teori Ganti Kerugian, hukuman diadakan untuk mengganti kerugian-kerugian yang telah diderita akibat dari kejahatan atau pelanggaran itu.
- e. Menurut teori Menakut-nakuti, hukuman diadakan untuk menimbulkan perasaan takut kepada si pelanggar akan akibat perbuatannya yang melanggar itu sehingga ia akan selalu takut melakukan perbuatan itu dan mau meninggalkannya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tiap teori itu masih belum lengkap karena masing-masing hanya mencakup satu aspek saja. Tiap-tiap

teori tadi saling membutuhkan kelengkapan dari teori yang lain. Selanjutnya tujuan hukuman menurut M. Arifin ada dua, yaitu:

- a. Membangkitkan perasaan tanggung jawab manusia didik. Hukuman di sini merupakan ancaman terhadap rasa aman yang merupakan kebutuhan pokok anak didik dalam belajar.
- b. Memperkuat atau memperlemah respon negatif. Namun penerapannya harus didasarkan atas kondisi yang tepat, tidak asal membrikan hukuman terhadap perilaku yang kurang sebanding dengan tujuan pokoknya.

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa tujuan dari hukuman dalam pendidikan adalah untuk memperbaiki tabiat dan tingkah laku anak didik untuk mendidik anak kearah kebaikan sehingga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan bertanggungjawab atas kesalahannya.

2. Tata tertib sebagai alat kontrol perkembangan kepribadian siswa

Dalam pembentukan, pembinaan dan pengembangan kedisiplinan, setiap sekolah sebagai lembaga pendidikan yang bersifat formal, negeri maupun swasta perlu mempunyai aturan atau tata tertib. Hal ini dikarenakan peranan tata tertib di sekolah adalah mengatur kehidupan para siswa baik yang bersifat kurikuler maupun ekstra kurikuler.

Tata tertib sebagai alat kontrol perkembangan kepribadian siswa di dalam maupun di luar sekolah memiliki tujuan atau ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Tata tertib dan disiplin sekolah dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
- b. Tata tertib dan disiplin sekolah dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut



sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi nilai ketaqwaan, tata karma dan sopan santun, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar mengajar yang efektif.

- c. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib dan disiplin sekolah secara konsekuen dan penuh kesadaran.

Dalam kenyataan sehari-hari masih banyak diantara para pelajar yang melanggar tata tertib sekolah. maka perlu upaya atau strategi untuk mengurangi jumlah pelanggaran serta dapat mengukur jenis pelanggarannya. Dalam hal ini strategi sistem scoring/poin dapat digunakan sebagai alternatif dalam mengatasi masalah pelanggaran disiplin sekolah. Sistem skor poin dalam tata tertib siswa adalah alat kontrol perkembangan kepribadian siswa di dalam maupun di luar sekolah. Dalam hal ini sistem skor poin memberikan kewenangan kepada semua guru untuk memberikan skor poin kepada siswa yang melanggar, setelah poin mencapai kapasitas yang ditentukan, maka guru atau kepala sekolah berhak menghukum atau memberikan sanksi kepada siswa, kemudian setelah guru atau kepala sekolah memberi hukuman, siswa tersebut di kirim kepada guru bimbingan konseling untuk ditindak lanjuti.

Sistem poin adalah pemberian poin kepada setiap siswa yang melanggar tata tertib madrasah dengan memberikan sanksi atau hukuman dalam bentuk poin negatif, berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Dengan beberapa tahapan sanksi yang diberikan meliputi :

- a. Apabila poin negatif mencapai 30 poin, akan diberikan teguran dan nasehat serta diberikan surat peringatan tertulis yang diketahui oleh orang tua.
- b. Apabila poin negatif mencapai 31 sd 60 poin, dipanggil orang tua dan diberikan peringatan I (pertama) serta skorsing

selama satu hari dengan diberikan tugas tertentu.

- c. Apabila poin negatif mencapai 61 sd 99 poin, dipanggil orang tua dan diberikan peringatan II (kedua) serta skorsing selama tiga hari dengan diberikan tugas tertentu
- d. Apabila poin negatif mencapai 100 poin, dipanggil orang tua dan siswa tersebut diserahkan kembali kepada orang tua atau dikeluarkan dari madrasah.

Selanjutnya apabila siswa memperoleh poin positif dapat menghapus atau mengurangi poin negatif siswa yang bersangkutan dengan tidak menghapus sanksi yang sudah berjalan selama ini. Seperti membersihkan halaman, selokan, Musholla, kamar mandi/wc. Adapun ketentuan poin untuk jenis pelanggaran ada yang 5 poin, 10 poin, 15 poin, 25 poin, 50 poin, 75 poin, dan 100 poin.

- 1) Ketentuan jenis pelanggaran dengan skor 5 poin meliputi :
  - a) Datang terlambat
  - b) Keluar kelas tanpa ijin
  - c) Tidak melaksanakan tugas piket
  - d) Tidak berseragam lengkap/olahraga
  - e) Tidak membawa Al Qur'an/ perlengkapan shalat
  - f) Membuang sampah tidak pada tempat nya
  - g) Mencoret-coret tembok/meja/kursi dan merusak tanaman
  - h) Menggunakan perhiasan yang berlebihan
  - i) Rambut gondrong/ memakai gelang/ anting/ kalung bagi siswa putera
  - j) Rambut dicat, kuku panjang, kuku dicat
  - k) Tidak mengikuti kegiatan madrasah
- 2) Ketentuan jenis pelanggaran dengan skor 10 poin meliputi :
  - a) Keluar madrasah tanpa ijin atau alpa

- b) Melompat pagar atau jendela
  - c) Tidak mengikuti shalat berjamaah
  - d) Sengaja tidak mengikuti ekstrakurikuler
  - e) Membawa barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran
  - f) Mengacau kelas/madrasah
  - g) Tidur dikelas/ tempat lain dilingkungan madrasah pada saat pelajaran berlangsung
  - h) Membuat surat ijin palsu/tanda tangan palsu
  - i) Menantang, mengancam, mengintimi- dari teman
  - j) Memarkir kendaraan diluar tempat parkir yang sudah ditentukan
- 3) Ketentuan jenis pelanggaran dengan skor 15 poin meliputi :
- a) Mengaktifkan HP pada saat pelajaran berlangsung
  - b) Membawa dan memainkan domino, kartu bridge, bola dsb pada saat jam pelajaran
- 4) Ketentuan jenis pelanggaran dengan skor 25 poin meliputi :
- a) Membawa buku/ gambar/ cd porno
  - b) Merusak sarana prasarana madrasah
  - c) Bersikap tidak sopan/ menentang/ menyinggung guru/ karyawan
  - d) Membawa rokok di lingkungan madrasah
  - e) Mengambil barang tanpa ijin pemilik nya
  - f) Siswa berlainan jenis berduaan/ bergan- dengan tangan
  - g) Terlibat perkelahian pertama
- 5) Ketentuan jenis pelanggaran dengan skor 50 poin meliputi :
- a) Terlibat perkelahian kedua
  - b) Membawa obat/miniuman terlarang dilingkungan madrasah
  - c) Merokok didalam atau diluar lingkungan madrasah
- 6) Ketentuan jenis pelanggaran dengan skor 75 poin meliputi :
- a) Berurusan dengan pihak berwajib karena tinda kejahatan/kriminal
  - b) Mengancam guru/karyawan
  - c) Siswa berlainan jenis berpelukan/ berciuman
  - d) Terlibat penyalahgunaan narkoba/obat terlarang lainnya
  - e) Menggunakan senjata tajam untuk mengancam
  - f) Memperjualbelikan buku/majalah kaset/CD terlarang
- 7) Ketentuan jenis pelanggaran dengan skor 100 poin meliputi :
- a) Berzinah
  - b) Menikah
  - c) Hamil/menghamili
  - d) Membawa senjata tajam unutup melukai
  - e) Menggunakan obat/miniuman terlarang dilingkung an madrasah
  - f) Berjudi dilingkungan madrasah
  - g) Perkelahian ketiga
- Dalam ketentuan poin negatif mengatur masalah kerajinan (keterlambatan/ kehadiran), pakaian (kepantasan/ kerapian/ kelengkapan pakaian), kelakuan meliputi ; kepribadian, ketertiban, rokok/ makanan/ minuman, buku/ majalah/ gambar /CD porno, senjata, obat terlarang, pergaulan bebas/kesusilaan, perkelahian dan tindak kriminal yang berkaitan dengan pihak berwajib. Selanjutnya setiap siswa yang memiliki prestasi baik di madrasah maupun diluar madrasah (secara resmi mewakili madrasah) akan diberikan poin positif prestasi berdasarkan jenis dan tingkat prestasi yang diraihny. Poin positif itu dapat menghapus poin negatif yang telah diterima siswa/i. Poin positif menyangkut hasil kegiatan berupa prestasi akademik dan prestasi ekstrakurikuler berdasarkan tingkatan prestasi.

### 3. Peran guru dalam pendidikan

Pendidikan erat kaitannya dengan belajar, pendidikan dapat diperoleh dengan belajar, baik secara formal ataupun tidak. Karena pada hakekatnya intisari dari belajar adalah perubahan. Belajar adalah



kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor (Syaiful Bahri Djamarah, 2002, h. 13)

Untuk itu perlu diciptakan situasi dan kondisi sekolah yang aman, damai dan menyenangkan, agar peserta didik dapat mengembangkan segenap potensi dirinya seoptimal mungkin. Pendidik membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya sebagai bekal hidup mereka, agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dengan capaian itu ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia ideal yang menjadi harapan setiap orang tua dan masyarakat. (Syaiful Bahri Djamarah, 2002, h.40)

Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu guru harus memiliki standar kualitas pribadi. Dimana guru harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya dalam pembelajaran di sekolah, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Guru harus berwibawa dalam arti guru dituntut memiliki kelebihan dalam merealisasikan nilai spritual, emosional, moral, sosial dan intelektual dalam pribadinya serta memiliki kelebihan dalam ilmu pengetahuan, teknologi sesuai dengan bidang yang dikembangkan. Disamping itu guru harus mengambil keputusan secara mandiri (independent) terutama dalam berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas pendidikan dan pembelajaran serta bertindak sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan, mengambil keputusan secara cepat, tepat waktu dan tepat sasaran. Disamping itu pula guru harus mematuhi berbagai peraturan dan tata tertib serta kode etik guru secara konsisten atas kesadaran profesional, karena mereka bertugas untuk

mendisiplinkan para peserta didik. (Mulyasa, 2007). Sebagai seorang pendidik yang baik, dia akan selalu memotivasi anak didiknya untuk terus belajar dan berkarya. Dimana secara terus menerus guru akan mengajak anak didiknya untuk mengembangkan kreativitas dan keahliannya diharapkan akan membawa implikasi yang sangat besar dalam perkembangan pola pikir dan pola sikap peserta didik.

Motivasi diberikan seorang guru, apalagi karena sang guru telah berhasil memerankan diri sebagai orang tua kedua bagi anak didiknya, akan sangat berkesan. Dengan motivasi tersebut, anak didik akan memiliki semangat baru dalam menyikapi semua hal yang terjadi dalam bidang kehidupan, tentunya termasuk pelajaran yang diajarkan di sekolah. Motivasi yang diberikan oleh guru dapat menjadi titik pelita penerang bagi kehidupan para siswa. Dengan motivasi guru, anak didik akan semakin bersemangat untuk berkreasi dan mengembangkan kreativitasnya. (Mulyasa, 2007, h.46)

Dalam hal ini guru berperan sebagai teladan bagi para peserta didik dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru. Sebagai teladan, tentu saja dia menjadi panutan dan apa yang dilakukan guru akan mendapat sorotan dari peserta didik dan orang-orang di sekitar lingkungannya. Menjadi teladan merupakan sifat dasar kegiatan pembelajaran, ketika seorang guru tidak mau menerimanya ataupun menggunakannya secara konstruktif maka akan mengurangi keefektifan pembelajaran. Guru memiliki peran yang sangat penting sebagai publik figur dan sumber belajar (*learning resource*) bagi para siswa, walaupun kemajuan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat dan dapat digunakan sebagai salah satu sumber belajar, akan tetapi guru dalam proses pembelajaran tetap diperlukan sebagai teladan dan sumber yang sangat penting. (Suparlan, 2006, h.36)

Memang keteladan merupakan prasyarat keberhasilan seorang guru pendidikan agama Islam dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Al Qur'an surah al Ahzab ayat 21 yang menjelaskan bahwa pada diri Rasulullah saw terdapat teladan yang baik dan ini merupakan kunci sukses dan keberhasilan Rasulullah saw dalam menjalankan misinya menyampaikan ajaran Islam.

Oleh karena itu setiap lembaga pendidikan harus mengarahkan peserta didik memperoleh perubahan sikap dan prilaku yang baik dengan memberikan bimbingan secara persuasive terhadap setiap peserta didik, khususnya yang memiliki prilaku menyimpang, agar menjadi anak yang berakhlak mulia.

#### **4. Urgensi Bimbingan dalam lembaga pendidikan**

Kebutuhan peserta didik akan hubungan bantuan (*helping relationship*), pada dasarnya timbul dari dalam diri individu, yang melahirkan seperangkat pertanyaan mengenai apakah yang harus diperbuat untuk kebahagiaan mereka. Bimbingan merupakan usaha membantu peserta didik dalam mengembangkan kehidupannya, membantu siswa untuk mengenali serta menerima diri serta potensinya membantu menentukan pilihan-pilihan yang tepat dalam hidup, membantu siswa berani menghadapi masalah hidup, dan lain-lain.

Pendidik melakukan aktifitas bimbingan dengan selalu memberikan motivasi, nasehat atau berupa anjuran-anjuran dan saran saran dalam bentuk pembicaraan yang komunikatif antara guru dan siswa (klien), dimana insiatif datang dari pihak siswa yang disebabkan karena ketidak tahuan atau kurangnya pengetahuan sehingga ia memohon pertolongan kepada guru agar dapat memberikan bimbingan dengan metode-metode psikologis dan pendekatan keagamaan dalam upaya untuk mengembangkan kualitas kepribadian

yang tangguh, kualitas kesehatan mental dan prilaku-prilaku yang lebih efektif pada diri individu dan lingkungannya.(M. Hamdani Bakran adz-Dzaky, 2001, h.128).

Kesiapan mental siswa tidak sama dalam menghadapi tantangan di era global yang makin kompleks, penuh gejolak dan dapat menyebabkan ketidak seimbangan. Ketidak seimbangan itu kemudian menimbulkan gangguan kejiwaan, dan banyak orang terkungkung dalam kerangkeng manusia modern sebagai the hollow man, manusia yang sudah kehilangan makna, resah setiap kali harus mengambil keputusan bahkan tidak tahu apa yang diinginkan. Mereka terasing di tengah keramaian, kehilangan keberdayaan di tengah kompetisi. Gangguan kejiwaan manusia modern adalah dimulai dengan mengindap kecemasan, disusul merasa kesepian, kemudian mengidap kebosanan dan ujungnya adalah perilaku menyimpang, anarki dalam semua bidang, di rumah, di jalanan, di sekolah, di tempat kerja.

Menurut pendapat para ahli jiwa, bahwa yang mengendalikan kelakuan dan tindakan seseorang adalah kepribadiannya. Kepribadian tumbuh dan terbentuk dari pengalaman-pengalaman yang dilaluinya sejak lahir. Bahkan mulai dari dalam kandungan ibunya sudah ada pengaruh terhadap kelakuan, kesehatan mental anak pada umumnya. Dengan memberikan pengalaman-pengalaman yang baik, nilai-nilai moral yang tinggi, serta kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan ajaran agama sejak lahir, maka semua pengalaman itu akan menjadi bahan dalam pembinaan kepribadian.

Kepribadian yang dapat mengendalikan kelakuan dan tindakan seseorang adalah kepribadian yang tangguh yang tumbuh dan terbentuk dari nilai-nilai agama islam serta pengalaman-pengalaman yang dilaluinya sehingga melahirkan anak yang memiliki kesehatan mental dan akhlakul karimah. Dalam bimbingan konseling islami proses

memberikan bantuan kepada peserta didik berupa pemahaman dan internalisasi terhadap nilai-nilai agama islam, agar siswa dapat menyesuaikan diri dan mampu hidup selaras dengan ketentuan Allah yang meliputi ;

1. Hidup selaras dengan petunjuk Allah artinya sesuai dengan koderatnya yang ditentukan Allah, sesuai dengan sunnatullah, serta sesuai dengan hakekatnya sebagai makhluk Allah.
2. Hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah artinya sesuai dengan pedoman yang ditentukan Allah melalui RasulNya (Ajaran Islam).
3. Hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah berarti menyadari eksistensi diri sebagai makhluk Allah yang diciptakan hanya untuk mengabdikan kepadaNya. (Aunur Rahim Faqih, 1997, h.4)

Kepribadian yang mengendalikan kelakuan dan tindakan seseorang adalah kepribadian yang tangguh yang tumbuh dan terbentuk dari nilai-nilai agama islam serta pengalaman-pengalaman yang dilaluinya sehingga melahirkan anak yang memiliki kesehatan mental dan akhlakul karimah.

#### **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penyajian dan analisis data diatas, maka selanjutnya akan dilakukan pembahasan terhadap permasalahan penelitian meliputi implimentasi sistem poin dan implikasi penerapan sistem poin terhadap disiplin siswa MAN 2 Model Banjarmasin sebagai berikut :

#### **1. Implementasi Sistem Poin Pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin.**

Madrasah Aliyah Negeri 2 Model sebagai lembaga pendidikan yang bersifat formal, mempunyai aturan atau tata tertib madrasah dan sistem pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan peranan tata tertib di sekolah adalah mengatur kehidupan para pelajar baik yang bersifat kurikuler maupun ekstra kurikuler. Salah satu upaya

yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan siswa dalam belajar di sekolah adalah menegakkan disiplin dan ketertiban, hal ini hendaknya dilaksanakan dengan dilandasi nilai moral/budi pekerti yang diintegrasikan pada mata pelajaran seperti pendidikan agama, pendidikan kewarga negaraan. serta mata pelajaran lain yang relevan, sebagai alat kontrol perkembangan kepribadian siswa di dalam maupun di luar sekolah.

Penerapan sistem poin pada MAN 2 Model Banjarmasin telah berjalan dengan baik, dimana kepala madrasah bertugas memberikan pengarahan dan mengambil keputusan, wakil kepala madrasah bidang kesiswaan bertugas mengkoordinir dalam mengimplimentasikan sistem poin, petugas BK bertugas melaksanakan pencatatan, pemanggilan, menasehati dan pembinaan siswa yang melanggar poin negatif, dewan guru bertugas untuk menasehati dan melaporkan kepada guru BK untuk dicatat, wali kelas bertugas menasehati dan membina siswa asuhan bila melakukan pelanggaran poin negatif dan menyerahkan penyelesaiannya kepada guru BK bila memerlukan tindakan lebih lanjut, dan staf madrasah membantu administasi dalam pelaksanaan sistem poin tersebut. Hal yang positif yang perlu dipelihara dan dikembangkan dalam pelaksanaan sistem poin dengan menciptakan hubungan harmonis dan kerjasama yang baik dari seluruh staf madrasah agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan mudah dan mencapai sasaran.

Program pembinaan disiplin dengan penerapan sistem poin dimaksudkan mengatur disiplin siswa madrasah menyangkut kerajinan (keterlambatan/kehadiran), pakaian (kepantasan/ kerapian/ kelengkapan pakaian), kelakuan meliputi; kepribadian, ketertiban, rokok/ makanan/ minuman, buku/ majalah/ gambar /CD porno, senjata, obat terlarang, pergaulan bebas/kesusilaan, perkelahian dan tindak kriminal yang berkaitan dengan pihak berwajib. Selanjutnya setiap siswa yang

memiliki prestasi baik di madrasah maupun diluar madrasah (secara resmi mewakili madrasah) akan diberikan poin positif prestasi berdasarkan jenis dan tingkat prestasi yang diraihinya. Poin positif itu dapat menghapus poin negatif yang telah diterima siswa/i. Poin positif menyangkut hasil kegiatan berupa prestasi akademik dan prestasi ekstrakurikuler berdasarkan tingkatan prestasi.

Dalam implimentasinya sistem poin pada MAN 2 Model Banjarmasin dilaksanakan setiap hari sekolah mulai jam 7.30 wit masuk sampai 15.05 pulang, dimana setiap guru dan petugas BK bila menemukan pelanggaran akan dibawa kepetugas BK yang menangani sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk dicatat dalam buku poin/pelanggaran yang besarnya sesuai dengan jenis pelanggarannya. Hal ini sudah berjalan dengan baik, dimana semua guru jika menemukan pelanggaran selalu menegur dan menyerahkan pelanggaran itu kepada guru Bk, untuk dicatat dan diberikan hukuman yang mendidik sesuai dengan jenis pelanggarannya.

Tujuan pelaksanaan sistem poin pada MAN 2 Model Banjarmasin untuk menciptakan kedisiplinan dan ketertiban siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, agar tercipta situasi dan kondisi yang kondusif di madrasah. Dalam rangka itu pula, maka perlu membuat strategi untuk meningkatkan ketertiban dan mengurangi jumlah pelanggaran serta dapat mengukur jenis pelanggarannya dengan menggunakan strategi sistem poin/skorng di madrasah. Hal ini dilakukan agar para siswa madrasah dapat berperilaku disiplin, tertib dan taat aturan dalam berbagai aktivitas madrasah disamping itu dengan penerapan sistem poin/skorng yang tegas dan jelas sanksinya di madrasah diharapkan dapat mengurangi tingkat pelanggaran/kenakalan para siswa. Oleh karena itu madrasah berupaya membina, mengarahkan dan mengembangkan peserta didik

memperoleh perubahan sikap dan prilaku yang baik dengan memberikan bimbingan secara persuasive terhadap setiap peserta didik, khususnya yang prilaku menyimpang, agar menjadi anak yang disiplin dan berakhlak mulia.

Dalam pelaksanaan sistem poin telah ditetapkan pedoman yang jelas sebagai instrumen dalam pelaksanaannya. Instrumen tersebut telah disosialisasikan kepada setiap siswa dan orang tua wali, diharapkan dengan itu timbul pemahaman dan kesadaran para siswa terhadap arti penting tata tertib dan kedisiplinan serta kerjasama yang baik dalam membangun iklim madrasah yang sehat dan bertanggungjawab. Disamping itu pula hal tersebut dapat mendorong keterlibatkan orang tua/wali untuk berpartisipasi dalam mengarahkan anak-anaknya untuk selalu berusaha mentaati semua ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu penggunaan instrumen sitem poin yang jelas dan transparan dapat memberi efek positif terhadap penegakan disiplin madrasah. Namun dalam penerapannya instrumen sitem poin hendaknya memperhatikan langkah langkah yang ada dalam prosedur konseling yaitu melakukan langkah diagnosa, prognosa, terapi, evaluasi dan follow up.

Jadi dalam melaksanakan sistem poin ini bila ditemukan siswa yang melanggar tata tertib madrasah tidak langsung diberikan sanksi atau hukuman dalam bentuk poin negatif, tetapi petugas hendaknya membantu siswa tersebut dengan mencoba mencari tahu penyebab pelanggaran itu, kemudian bersama-sama berusaha menemukan solusi dan menerapkannya sampai persoalan itu terselesaikan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab. Hal tersebut dilakukan agar siswa yang melakukan pelanggaran memahami kekeliruannya dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Bukan memberikan hukuman yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dan merugikan para siswa, apalagi kalau

hukuman tersebut menggunakan pasal berlapis, seperti halnya dalam sekali peristiwa siswa datang terlambat tidak pakai dasi, ikat pinggang, dan seragam yang tidak sesuai, maka langsung mendapat poin negatif sebesar 20 poin. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan penerapan sistem poin yang ingin mengingatkan para siswa agar hati-hati terhadap aturan tata tertib madrasah dan harus berprilaku disiplin, bukan mencari-cari kesalahan yang dapat menekan dan memojokan siswa sehingga dapat menimbulkan kecemasan dan ketegangan yang mengganggu konsentrasi belajar mereka. Semestinya bila terjadi pelanggaran petugas BK berusaha memahami penyebab pelanggaran itu, kemudian bersama sama mencari solusi dalam menyelesaikan masalah itu, sehingga masalahnya dapat teratasi dan siswa menyadari kesalahannya.

Sementara itu pula dalam penerapan sanksi yang diberikan tidak terlihat upaya pencegahan (preventif), dimana apabila siswa memperoleh poin negatif mencapai 25/30 poin, siswa yang bersangkutan dipanggil guru BK dan menghadap wali kelas untuk diberikan teguran dan nasehat serta diberikan surat peringatan tertulis yang diketahui oleh orang tua, tanpa menggunakan pendekatan bimbingan dan konseling dengan mencari tahu penyebab pelanggaran untuk diberikan bimbingan dalam membantu menyelesaikan masalahnya agar siswa yang bersangkutan menyadari masalahnya dan tidak mengulanginya. Demikian pula apabila poin negatif mencapai 31 sd 60 poin, baru dipanggil siswa dan orang tuanya menghadap wali kelas untuk diberikan teguran atau nasehat dan diberikan peringatan I (pertama) serta skorsing selama satu hari dengan diberikan tugas tertentu, tanpa diberikan bimbingan dalam membantu menyelesaikan masalahnya agar siswa yang bersangkutan menyadari masalahnya dan tidak mengulanginya.

Selanjutnya Apabila poin negatif mencapai 61 sd 99 poin, kembali dipanggil siswa dan orang tuanya menghadap wali kelas untuk diberikan teguran atau nasehat dan diberikan peringatan II (kedua) serta skorsing selama tiga hari dengan diberikan tugas tertentu, tanpa diberikan bimbingan dalam membantu menyelesaikan masalahnya agar siswa yang bersangkutan menyadari masalahnya dan tidak mengulanginya. Dan akhirnya Apabila poin negatif mencapai 100 poin, dipanggil orang tua dan siswa tersebut diserahkan kembali kepada orang tua atau dikeluarkan dari madrasah. Padahal penegakan disiplin di madrasah dalam rangka membantu siswa dalam mengembangkan diri, agar menjadi manusia yang baik, berguna bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara. Bukan menghindari tanggung jawab yang diamanatkan oleh orang tua/wali kepada mereka agar anaknya menjadi orang baik.

Kemudian dari pada itu ketentuan besaran poin negatif untuk jenis pelanggaran ada yang 5 poin, 10 poin, 15 poin, 25 poin, 50 poin, 75 poin, dan 100 poin, dirasakan terlalu besar yang dapat mengancam kelangsungan pendidikan siswa di madrasah tersebut, terutama sanksi yang besar 50 poin, 75 poin, dan 100 poin, padahal sanksi pemberian poin itu hanya dalam rangka menumbuhkan kesadaran untuk berdisiplin, bukan memberikan efek jera atau membuat resah dan cemas para siswa dan orang tua kerana mengancam kelangsungan pendidikan siswa yang bersangkutan.

Tata tertib dan disiplin sekolah dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Tata tertib dan disiplin sekolah dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut madrasah dan masyarakat sekitar, yang

meliputi nilai ketaqwaan, tata karama dan sopan santun, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar mengajar yang efektif. Setiap siswa wajib mematuhi ketentuan yang tercantum dalam tata tertib dan disiplin sekolah secara konsekuen dan penuh kesadaran. Oleh karena itu setiap lembaga pendidikan harus mengarahkan peserta didik memperoleh perubahan sikap dan perilaku yang baik dengan memberikan bimbingan secara persuasive terhadap setiap peserta didik, khususnya yang belum memiliki akhlakul karimah (perilaku menyimpang), agar menjadi anak yang berakhlak mulia. Bukan menekan dan memaksa peserta didik agar berperilaku sesuai kehendak sekolah, dan bahkan menghindar dengan mengembalikan peserta didik yang bermasalah kepada orangtua.

Seorang anak yang terus-menerus melakukan perbuatan yang buruk padahal sudah sering kali diperingatkan agar tidak melakukan perbuatan tersebut mau tidak mau harus dihentikan dengan hukuman, sebab kalau kebiasaan buruknya tidak segera dihentikan, maka sang anak malah akan semakin berani. Tentunya hukuman itu harus ringan dan mengena kepada sasaran. Hukuman itu sama sekali tidak mendidik, sebab hukuman itu tidak menghilangkan motivasi buruknya. Memang ia akan mengurungkan niatnya karena perasaan takut, tapi di dalam batinnya keinginan itu tetap ada. Ketika rasa takut itu hilang si anak akan kembali mengulangi perbuatan buruknya. Hukuman itu mungkin dihadapi oleh si anak dengan pura-pura berjanji akan menghentikan kebiasaan buruknya. Karena itu patut diingat bahwa hukuman juga akan melahirkan anak-anak yang asosial, penakut serta pasif.

Hukuman itu tidak menghentikan apa yang bergetar di dalam batin. Untuk menghentikan kenakalan-kenakalannya kita harus mempelajari apa sebetulnya

yang menjadi latar belakang kenakalan-kenakalannya dan kita cari solusinya sehingga anak-anak itu tidak mengulangi perbuatan buruknya. Tetapi jika si anak tetap saja mengulangi perilaku jeleknya, maka tidak ada cara lain selain memberinya hukuman. Rasa takut akan hukuman itu dapat menghentikan keinginan atau minimal mengurangi minatnya untuk berbuat buruk. Kalau hukuman itu diberikan secara proporsional, tidak akan melahirkan hal-hal yang tidak diharapkan. Memang benar seorang anak harus tumbuh dalam keceriaan dan kebebasan tapi pada saat yang sama anak-anak juga harus diajari bahwa di dunia ini tidak semua orang bisa hidup dengan kebebasan mutlak, apalagi kalau kebebasan itu dapat merugikan orang lain.

Hukuman adalah instrumen sekunder dan diberikan dalam kondisi serta syarat tertentu. Jadi, kalau guru atau orangtua masih bisa menangani anak didiknya dengan nasihat-nasihat atau dengan penjelasan rasional, maka tidak perlu lagi memberikan hukuman. Hukuman itu boleh diberikan setelah nasihat-nasihat verbal atau apa saja tidak lagi dapat mengusik kesadarannya. Menurut Russel hukuman dalam proses pendidikan sangat tidak berarti, bahkan mungkin hanya masuk sebagai alternatif kedua. hukuman fisik kadang-kadang diperlukan. Tetapi harus disadari bahwa tujuan sebuah pendidikan adalah mendidik moral. Yang harus kita lakukan adalah membuat si anak tersebut merasa malu berbuat nakal dan bukan malah takut akan hukuman. Hukuman memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membina anak-anak, malahan dalam situasi tertentu mutlak diperlukan sekali. jangan sekali-kali memberikan hukuman yang akan merendahkan harga diri anak, seperti hukuman badan, ancaman dengan siksaan atau apa saja demi menghancurkan keinginan buruknya.



Guru dituntut memiliki kelebihan dalam merealisasikan nilai spritual, emosional, moral, sosial dan intelektual dalam pribadinya serta memiliki kelebihan dalam ilmu pengetahuan, teknologi sesuai dengan bidang yang dikembangkan. Disamping itu guru harus mengambil keputusan secara mandiri (independent) terutama dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran dan bertindak sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan, serta mengambil keputusan secara cepat, tepat waktu dan tepat sasaran, tanpa menunggu perintah atasan. Selain itu guru harus mematuhi berbagai peraturan dan tata tertib serta kode etik guru secara konsisten atas kesadaran profesional, karena mereka bertugas untuk mendisiplinkan para peserta didik

Guru membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya sebagai bekal hidup mereka, agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dengan capaian itu ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia ideal yang menjadi harapan setiap orang tua dan masyarakat

Bimbingan merupakan usaha membantu peserta didik dalam mengembangkan kehidupannya, membantu siswa untuk mengenali serta menerima diri serta potensinya membantu menentukan pilihan-pilihan yang tepat dalam hidup, membantu siswa berani menghadapi masalah hidup, dan lain-lain. Dimana guru pembimbing dalam kegiatan bimbingan melakukan aktifitas pemberian nasehat atau berupa anjuran-anjuran dan saran saran dalam bentuk pembicaraan yang komunikatif antara guru dan siswa (klien), yang mana insiatif datang dari pihak siswa yang disebabkan karena ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan sehingga ia memohon pertolongan kepada guru agar dapat memberikan bimbingan dengan metode-metode psikologis dan pendekatan keagamaan dalam upaya untuk

mengembangkan kualitas kepribadian yang tangguh, kualitas kesehatan mental dan prilaku-prilaku yang lebih efektif pada diri individu dan lingkungannya

Kebutuhan peserta didik akan hubungan bantuan (*helping relationship*), pada dasarnya timbul dari diri dan luar individu yang melahirkan seperangkat pertanyaan mengenai apakah yang harus diperbuat peserta didik. Kesiapan mental orang tidak sama dalam menghadapi era global yang makin kompleks, penuh gejolak dan dapat menyebabkan ketidak seimbangan. Ketidak seimbangan itu kemudian menimbulkan gangguan kejiwaan, dan banyak orang terkungkung dalam kerangkeng manusia modern sebagai the hollow man, manusia yang sudah kehilangan makna, resah setiap kali harus mengambil keputusan bahkan tidak tahu apa yang diinginkan. Mereka terasing di tengah keramaian, kehilangan keberdayaan di tengah kompetisi.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 bab II pasal 3 yang berbunyi bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu semua pendidikan tidak dapat dilaksanakan secara otoriter, yang mencoba memaksa peserta didik agar berperilaku disiplin, patuh dan taat terhadap kehendak dan ketentuan sekolah, namun pendidikan sekolah hendaknya bersikap demokratis, yang dapat memahami kehendak dan tuntutan peserta didik dan kepentingan sekolah/madrasah secara berimbang, karena bila anak dibesar dengan penuh tekanan, maka anak akan belajar melawan.

Hukuman tidak mutlak diperlukan, untuk membuat anak jera, pendidik harus berlaku bijaksanan dalam memilih dan

memakai metode yang paling sesuai. Di antara mereka ada yang cukup dengan teladan dan nasehat saja, sehingga tidak perlu hukuman baginya. Tetapi, manusia itu tidak sama seluruhnya, diantara mereka ada pula yang perlu dihukum karena berbuat kesalahan. Asumsi yang berkembang selama ini di masyarakat adalah setiap kesalahan harus memperoleh hukuman; Tuhan juga menghukum setiap orang yang bersalah. Dari satu jalur logika teori itu ada benarnya. Memang logis, setiap orang yang bersalah harus mendapat hukuman; setiap yang berbuat baik harus mendapat ganjaran. Sebenarnya hukuman tidak selalu harus berkonotasi negatif yang berakibat sengsara bagi terhukum tetapi dapat juga bersifat positif.

## **2. Implikasi Sistem Poin terhadap tingkat disiplin siswa MAN 2 Model Banjarmasin**

Kedisiplinan merupakan hal penting yang harus dijaga dan dipelihara dalam pelaksanaan pendidikan, tinggi rendahnya tingkat kedisiplinan akan berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan. Sistem poin diharapkan dapat berimplikasi positif terhadap tingkat disiplin siswa. Tingkat disiplin siswa dapat dilihat dari tinggi rendahnya tingkat pelanggaran tata tertib. Tinggi rendahnya tingkat pelanggaran disiplin itu merupakan implikasi dari penerapan sistem poin, makin rendah tingkat pelanggaran makin positif implikasi sistem poin terhadap disiplin dan begitu juga sebaliknya. makin tinggi tingkat pelanggaran makin negatif implikasi sistem poin terhadap disiplin siswa.

Tingkat pelanggaran poin negatif siswa MAN 2 Model Banjarmasin pada periode januari sampai juni 2014 menunjukkan jumlah pelanggaran yang cukup tinggi yaitu sebanyak 1276 kasus, dengan rata-rata angka pelanggaran poin negatif sebesar 212,66/bulan. Atau 21,74% dari populasi siswa. Ini berarti tingkat pelanggaran disiplin siswa MAN 2 Model Banjarmasin pada periode januari sampai

juni 2014 cukup tinggi. Pelanggaran disiplin yang paling banyak terjadi menyangkut disiplin hadir sebanyak 899 kasus dengan tingkat pelanggaran rata-rata 150 kasus/bulan. Atau 15,33% dari populasi siswa. Kemudian disiplin berpakaian sebanyak 377 kasus dengan tingkat pelanggaran rata-rata 63 kasus/bulan. Atau 6,44% dari populasi siswa. Selanjutnya masalah kelakuan/kepribadian sebanyak 114 kasus dengan tingkat pelanggaran rata-rata 19 kasus/bulan. Atau 1,94% dari populasi siswa. Ini berarti tingkat pelanggaran disiplin siswa MAN 2 Model Banjarmasin pada periode januari sampai juni 2014 cukup tinggi. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tingginya tingkat pelanggaran ini menunjukkan bahwa sistem poin tidak berimplikasi positif terhadap tingkat disiplin siswa, terutama disiplin hadir dan berpakaian.

Ditinjau dari besar kecilnya nilai poin negatif pada periode januari sampai juni 2014 adalah nilai poin 5 sebanyak 1221 kasus tingkat pelanggaran rata-rata 203,5 kasus/bulan. Atau 20,8 % dari jumlah populasi siswa. Kemudian untuk nilai poin 10 hanya sebanyak 55 kasus dengan tingkat rata-rata pelanggaran 9,2 kasus/bulan. Atau 0,94 % dari jumlah populasi siswa. Bahkan untuk nilai poin 15, 25, 50, 75, dan 100 tidak ditemukan.

Tingginya tingkat pelanggaran disiplin terhadap poin yang bernilai kecil ini menunjukkan bahwa penerapan sistem poin tidak cukup untuk membuat anak disiplin. Ini berarti besar kecilnya nilai poin akan berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran disiplin, makin kecil nilai poin akan makin besar tingkat pelanggaran dan makin besar nilai poin akan makin kecil tingkat pelanggaran. Hal dikarenakan siswa akan lebih hati-hati terhadap ketentuan nilai poin negatif yang bernilai besar daripada nilai poin negatif yang bernilai kecil, karena hal itu dapat mengancam kelangsungan pendidikan mereka. Disamping itu penyebab rendahnya

pelanggaran terhadap poin negatif yang bernilai besar karena adanya partisipasi orang tua yang dilandasi kekhawatiran dan ketakutan terhadap kelangsungan pendidikan anak-anak mereka. Secara keseluruhan tingkat pelanggaran disiplin siswa MAN 2 Model Banjarmasin tidak menunjukkan penyimpangan yang serius dan hanya masalah masalah ringan saja, kebanyakan hanya masalah terlambat datang dan berpakaian. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penerapan sistem poin yang bernilai besar berimplikasi positif terhadap tingkat pelanggaran disiplin siswa, walaupun tingkat pelanggaran disiplin cukup tinggi namun pelanggaran itu hanya yang bersifat disiplin ringan saja, tidak ditemukan kenakalan kenakalan yang bersifat berat.

Penerapan sistem poin tidak cukup untuk membuat anak disiplin, sangsi/hukuman itu tidak menghentikan apa yang bergetar di dalam batin. Untuk menghentikan kenakalan-kenakalannya kita harus mempelajari apa sebetulnya yang menjadi latar belakang kenakalan-kenakalannya dan kita cari solusinya sehingga anak-anak itu tidak mengulangi perbuatan buruknya. Tetapi jika si anak tetap saja mengulangi perilaku jeleknya, maka tidak ada cara lain selain memberinya hukuman. Seorang anak yang terus-menerus melakukan perbuatan yang buruk padahal sudah sering kali diperingatkan agar tidak melakukan perbuatan tersebut mau tidak mau harus dihentikan dengan sangsi/ hukuman, sebab kalau kebiasaan buruknya tidak segera dihentikan, maka sang anak malah akan semakin berani. Rasa takut akan hukuman itu dapat menghentikan keinginan atau minimal mengurangi minatnya untuk berbuat buruk. Kalau hukuman itu diberikan secara proporsional, tidak akan melahirkan hal-hal yang tidak diharapkan. Memang benar seorang anak harus tumbuh dalam keceriaan dan kebebasan tapi pada saat yang sama anak-anak juga harus diajari bahwa di dunia ini tidak orang bisa

hidup dengan kebebasan mutlak, apalagi kalau kebebasan itu dapat merugikan orang lain.

Hukuman adalah instrumen sekunder dan diberikan dalam kondisi serta syarat tertentu. Jadi, kalau guru atau orangtua masih bisa menangani anak didiknya dengan nasihat-nasihat atau dengan penjelasan rasional, maka tidak perlu lagi memberikan hukuman. Hukuman itu boleh diberikan setelah nasihat-nasihat verbal atau apa saja tidak lagi dapat mengusik kesadarannya. Hukuman dalam proses pendidikan sangat tidak berarti, bahkan mungkin hanya masuk sebagai alternatif kedua. hukuman fisik kadang-kadang diperlukan. Tetapi harus disadari bahwa tujuan sebuah pendidikan adalah mendidik moral. Yang harus kita lakukan adalah membuat si anak tersebut merasa malu berbuat nakal dan bukan malah takut akan hukuman. Hukuman memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membina anak-anak, malahan dalam situasi tertentu mutlak diperlukan sekali, tetapi jangan sekali-kali memberikan hukuman yang akan merendahkan harga diri anak, seperti hukuman badan, ancaman dengan siksaan atau apa saja demi menghancurkan keinginan buruknya. melalui hukuman anak-anak akan menyadari kekeliruannya itu, dan kemudian dia akan lebih mengerti bahwa perbuatannya tidak disenangi orang lain dan karena ia ingin diterima oleh orang lain, ia akan berusaha menyesuaikan keinginannya dengan keinginan orang lain, supaya bisa mendapatkan bantuan atau memperoleh apa yang diinginkannya dari orang lain

Besar kecilnya nilai poin negatif akan berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran disiplin, makin kecil nilai poin negatif akan makin besar tingkat pelanggaran dan makin besar nilai poin negatif akan makin kecil tingkat pelanggaran. Dengan demikian ancaman yang berat memang dapat membuat anak takut, khawatir dan cemas, tapi tetap saja

tidak ada gunanya dalam pendidikan. Ancaman yang berat seperti itu baru efektif kalau bisa menyadarkan si anak. Sementara Ancaman yang berat seperti itu membuat si anak merasa terpaksa mentaati tata tertib dan bukan atas niat atau kesadarannya sendiri bahkan dapat membuat anak stres. Stress dapat mempunyai dua efek yang berbeda, bisa negatif ataupun positif, tergantung bagaimana kuatnya individu tersebut menghadapi stress atau bagaimana individu tersebut mempersepsikan stress yang sedang dihadapinya.

Stress merupakan reaksi akibat adanya tekanan mental atau beban kehidupan yang tidak mampu lagi diolah dan berujung pada kesehatan dan fungsi organ-organ tubuh. Stress melibatkan unsur psikis dan fisik sekaligus. Meski melibatkan fisik, tetapi sangat sulit untuk mengidentifikasi gejala stress sebab gangguan stress pada umumnya timbul secara lamban, tidak jelas kapan mulainya dan seringkali tidak disadari baik itu yang mengalami ataupun orang yang berinteraksi dengan penderita stress. Stress yang merupakan suatu respon atau reaksi individu yang muncul karena adanya situasi tertentu yang menimbulkan stress. Respon yang muncul dapat secara psikologis, seperti: jantung berdebar, gemetar, pusing, serta respon psikologis seperti: takut, cemas, sulit berkonsentrasi, dan mudah tersinggung. Stress adalah perasaan tertekan, cemas dan tegang. Menurut Lazarus & Folkman (1986) stress adalah keadaan internal yang dapat diakibatkan oleh tuntutan fisik dari tubuh atau kondisi lingkungan dan sosial yang dinilai potensial membahayakan, tidak terkendali atau melebihi kemampuan individu untuk mengatasinya.

Stress merupakan salah satu gangguan psikologis. Oleh karena itu, antara stress dan kesehatan fisik dapat saling mempengaruhi. Stress bisa menyebabkan menurunnya kondisi fisik, sebaliknya penurunan kondisi fisik pun bisa

menyebabkan stress. Stress sebagai interaksi antara individu dengan lingkungan, Pendekatan ini menggambarkan stress sebagai suatu proses yang meliputi stresor dan strain dengan menambahkan dimensi hubungan antara individu dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dengan lingkungan yang saling mempengaruhi disebut sebagai hubungan transaksional. Di dalam proses hubungan ini termasuk juga proses penyesuaian. Individu akan memberikan reaksi stress yang berbeda pada stresor yang sama. Jadi terdapat perbedaan dalam mengartikan tumbuhnya kesadaran terhadap stress merupakan proses yang kompleks dan dinamis yang sesuai dengan pendekatan biopsikososial terhadap kehidupan manusia.

Sekolah adalah dimensi yang sangat penting dalam mendukung perkembangan dan kehidupan peserta didik. Sekolah dipandang dapat memenuhi beberapa kebutuhan peserta didik dan menentukan kualitas kehidupan mereka di masa depan. Tetapi dalam ruang yang bersamaan sekolah juga merupakan sumber masalah, yang dapat menimbulkan masalah stress pada peserta didik. Sekolah tempat dimana anak menghabiskan waktunya ini merupakan salah satu sumber stress bagi anak-anak selain keluarga. Sekolah merupakan gambaran sebuah lingkungan sosial kecil bagi anak-anak dimana ia memiliki tanggung jawab-tanggung jawab tersendiri atas tugas-tugas yang harus mereka selesaikan, mengasah kemampuannya untuk berinteraksi sosial, mengenal diri mereka dan mereka dibatasi pula dengan berbagai aturan, nilai serta norma-norma yang harus dipatuhi. Lingkungan sosial atau masyarakat kecil yang “terikat” dapat menimbulkan stress pada anak. Ada fenomena stress yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa hidup di sekolah. Misalnya pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan melalui penerapan kurikulum yang diperkaya, intensitas belajar yang tinggi, rentang

waktu belajar formal yang lebih lama, tugas-tugas sekolah yang banyak, dan keharusan menjadi pusat keunggulan dan sebagainya telah menimbulkan stres dikalangan siswa. Oleh sebab itu, sebagai pendidik yang akan berhadapan dengan berbagai karakter peserta didik, perlu memahami masalah stres yang sudah mendarah daging di dunia pendidikan serta kita perlu memiliki upaya-upaya untuk meminimalisir fenomena ini bahkan berupaya untuk membangun suasana sekolah yang menyenangkan, sehingga para siswa mencintai sekolah sebagaimana hakikinya pendidikan bukan untuk ditakuti, dicemaskan terlebih lagi membuat para peserta didik stres dan frustrasi.

Manusia hidup dengan persoalan nya masing-masing. Ada yang sudah lama dihindangi oleh beban perasaan yang berat dan sering stres oleh situasi yang menekan, atau oleh sesuatu yang tidak dimengerti. Bingung serasa hampir memecahkan kepala, tak tahu harus bagaimana dan harus kemana. Teman-teman hanya mendekat kalau kita sedang maju, kalau sedang jatuh pada menjauh. Semua orang rasanya tak mau mengerti, Ketika masalah menerjang dan penderitaan jiwa menghimpit, pengobatannya adalah merenung mencari sebabnya yaitu introspeksi atau menghitung diri atas semua kesalahan, dan pelanggaran-pelanggaran yang pernah kita lakukan. Untuk itu diperlukan orang yang dapat membantu menyelesaikannya. Orang yang diminta nasehat harus orang yang tepat, yang bersih hatinya, lurus hidupnya, jernih pandangannya, taat agamanya, satu kata antara hati dan perbuatannya, bisa menguasai hawa nafsunya dan yang penting bisa menguraikan kesalahan-kesalahan kita, dengan berusaha memahami masalah dan mencari yang menjadi penyebab munculnya masalah-masalah yang ada dalam diri kita. Dengan memahami penyebab muncul masalah akan mudah menemukan solusinya

Banyak hal dalam kehidupan ini yang berliku dan menimbulkan kecemasan dalam menjalani hari, sebagai siklus kehidupan kita. memiliki banyak masalah dan ancaman, adalah sesuatu yang wajar, ketika salah mengambil keputusan, salah mempersepsi fakta dan tak pandai memecahkan masalah, sehingga hal itu merumitkan dan orang merasa berputus asa serasa memiliki ancaman, ketakutan, kecemasan dalam menghadapi kegiatan sekolah, hingga mengakibatkan efek stress yang berlebihan, dan menjadi beban psikis. yang pada akhirnya mengganggu konsentrasi belajar. Sebaliknya masalah stres dapat mendorong orang untuk merenung dan berfikir positif agar dapat bangkit dan tidak banyak berfikir negatif, memupuk diri dengan rasa berani dan percaya diri, bahwa kita dapat menyesuaikan diri dan diterima dalam lingkungan sekolah, inilah tingkat stress yang dapat mendorong orang untuk memberanikan diri menjadi pribadi yang baik dan diterima oleh kawan-kawan sekolah.

## **PENUTUP**

Dari uraian terhadap permasalahan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi sistem point dalam penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin sudah terlaksana dengan baik. Keberhasilan tersebut didukung oleh instrumen sistem poin yang jelas dan tegas, tujuannya yang mulia dan kerjasama yang baik dan harmonis.
2. Sistem point berimplikasi positif terhadap disiplin siswa pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin. Khususnya bagi siswa yang baik, dimana sistem poin dapat menjadi stressor untuk mendorong siswa menjadi lebih baik, hati-hati, selalu waspada dan disiplin terhadap ketentuan tata tertib yang berlaku. Sebaliknya bagi siswa yang bermasalah sistem poin dapat menjadi stressor yang mengakibatkan

- kan efek stres yang berlebihan, dan menjadi beban psikis. yang pada akhirnya mengganggu konsentrasi belajar.
3. Pelanggaran disiplin banyak terjadi pada poin yang bernilai kecil sedangkan pelanggaran disiplin pada poin yang bernilai besar tidak ditemukan. Dengan demikian besar kecilnya nilai poin berpengaruh terhadap tingkat disiplin siswa, makin besar nilai poin akan makin kecil tingkat pelanggaran disiplin dan makin kecil nilai poin akan

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A.S. 1990, *Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al Qur'an*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Anselm, S & J, Gorbin. 1997, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, (Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded)*, Bina Ilmu. Surabaya.
- Agus, Soejono. 1980, *Pendahuluan Ilmu Pendidikan Umum*. CV Ilmu. Bandung.
- Arifin. M. 1994, *Ilmu Pendidikan Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. rev. ed.: Bandung
- Baharits, A.H.S. 1996, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Hadari N & H.M.Maruni. 1995, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada Press. Yogyakarta.
- Indrakusuma, A.D. 1973, *Pengantar Ilmu Pengetahuan*. Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP. Malang.
- Istadi Irawati. 2005, *Agar Hadiah dan Hukuman Efektif*, Jakarta.
- Ibnu Hadjar. 1996, *Dasar-dasar metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, Raja Grafindopersada. Jakarta.
- J.J. Hasibuan, dkk. 1992. *Proses Belajar Mengajar*. Remaja Rodakarya, Bandung.
- JVS. Tondowidjojo CM. 1991. *Kunci Sukses Pendidikan*. Kanisius. Jakarta.
- Kartini kartono. 1980. *pengantar metodologi research social*. Alumni. Bandung.
- Mulyasa E. 2007. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Remaja Rosda karya. Bandung.
- Mujib. A & Jusuf M, 2006. *Ilmu Pendidikan Islam*, Kencana, Jakarta.
- Nasih Ulwan Abdullah, 1994. *Pendidikan Anak dalam Islam*, terj. Jamaludin Miri .Jakarta.
- Purwanto M. N, 1994. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung.
- Rahmat, J. 1994. *Psikologi Komunikasi*. Rosda Karya, Bandung.
- Soeitoe, S. 1982. *Psikologi Pendidikan*. FE UI Press. Jakarta.
- Sukadipura, B. 1982. *Aneka Problema Keguruan*. Angkasa, Bandung.
- Suwarno. 1992. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. PT. Rineka Cipta, Bandung.
- Suparlan, 2006. *Guru Sebagai Profesi*, Hikayat, Yogyakarta, 2006.
- Tafsir, A. 2001. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Remaja Rosda karya. Bandung .
- Winarno Surakhmad, 1994. *Pengantar Penelitian perreditian Ilmiah (Dasar Metode Teknik)*, Tarsito, Bandung.
- Quthb M.Q, 1993. *Sistem Pendidikan Islam*, terj. Salman Harun, Bandung.